



DOKUMEN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

KATA PENGANTAR

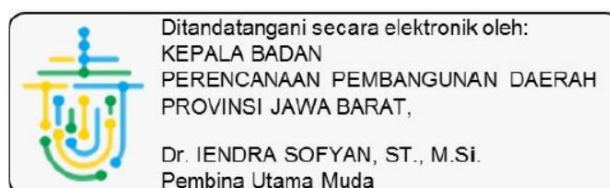
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi pencapaian kinerja perencanaan pembangunan khususnya di Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Demikian, semoga dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif untuk mendukung Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

Bandung, 21 Juli 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	II-28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat	II-29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	II-33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	III-2
3.3 Program dan kegiatan.....	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 ...	IV-1
BAB V P E N U T U P.....	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda
Provinsi Jawa Barat dan Pencapaian Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023II-2

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda
Provinsi Jawa Barat dan Pencapaian Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun
2024II-16

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ...II-29

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2025.....II-35

Tabel 3.1 Program Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2025 ke dalam Program Prioritas dan Program
Pembangunan Daerah ram dan Kegiatan Indikatif Bappeda
Provinsi Jawa Barat.....III-6

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Indikatif Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2025.....III-7

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat .III-11

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025IV-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah	I-2
Gambar 1.2 Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019 .	I-4
Gambar 2.1 Tampilan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).....	II-50
Gambar 2.2 Bagan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	II-51



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

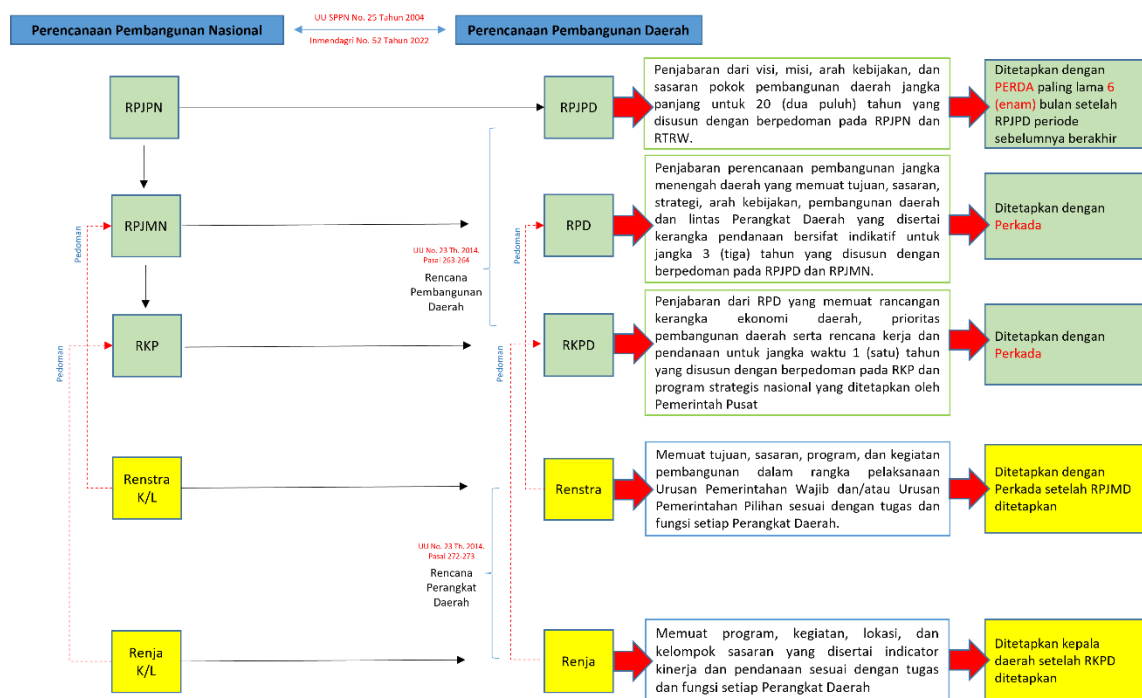
Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan segala potensi, permasalahan dan tantangan yang ada. Peran strategis perencanaan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Seiring dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional, pedoman penyusunan dokumen perencanaan masa transisi diatur lebih lanjut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri



Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Peraturan tersebut mengamanatkan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 atau DOB menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.



Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah

Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan Perangkat Daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah.

Secara sistematis, Renja Perangkat Daerah memuat kondisi ideal yang seharusnya diciptakan dengan disertai penjabaran mengenai cara pencapaiannya. Dengan demikian, substansi yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran konkret terkait pengukuran target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Kesenambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, menjadi tolok ukur dan menjadi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2025.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai andil dalam ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat wajib untuk menyusun dokumen Renja Tahun 2025. Dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dijadikan pedoman untuk perumusan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang berfokus untuk prioritas pembangunan, khususnya melalui penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis *e-government*. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat turut berperan dalam menyelesaikan target-target yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.



Pengelolaan keuangan daerah mengalami penyesuaian seiring terbitnya regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Seluruh regulasi tersebut merupakan langkah pembaharuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diterapkan dan diberlakukan pada tahun anggaran 2025.



Gambar 1.2
Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan PP 12 Tahun 2019

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dan telah diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Selanjutnya, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya turut memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.



I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran negara nomor 6794);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 21 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



- Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);
 26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 34); dan



29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13).

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2024, adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan Program/Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

Menjelaskan *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ke dalam Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025.

Menjelaskan hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 ke dalam Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.



BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan target program atau kegiatan. Dengan melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan target program atau kegiatan tersebut, selanjutnya dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampaui;
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 menilai pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang dibandingkan dengan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan merujuk pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merencanakan 3 (tiga) program, 14 kegiatan, dan 70 sub kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 14 kegiatan, dan 70 sub kegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023, disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat dan
Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat
sampai dengan Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					88,444,166.38	88,220,599.11		15,429,906.43		24,649,801.72		19,748,544.33		26,140,152.71		85,968,405.20		97.45		85,968,405.20		97.45	BAPPEDA	
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;	AA	Kategori	60,094,207.49	AA	60,043,793.81	60,094,207.49		12,166,144.38		17,703,570.75		13,397,887.85		15,452,735.51		58,720,338.49		97.71		58,720,338.49		97.71	Sekretariat
			2. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum;	80	Persen		100																			
			3. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.	80	Persen		100																			
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27	Dokumen	1,653,167.86	27	1,673,167.86	1,653,167.86	6	486,311.31	5	592,571.27	9	246,775.35	7	302,895.14	27	1,628,553.06	100	98.51	27	1,628,553.06	100	98.51	Perencanaan dan Pelaporan
	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	Dokumen	1,493,125.31	7	1,513,125.31	1,493,125.31	1	474,938.31	1	508,033.77	2	202,530.22	3	283,397.40	7	1,468,899.69	100	98.38	7	1,468,899.69	100	98.38	
	5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1	Dokumen	19,000.00	1	19,000.00	19,000.00	0	0.00	0	8,889.00	0	9,306.00	1	762.00	1	18,957.00	100	99.77	1	18,957.00	100	99.77	
	5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	19,000.00	1	19,000.00	19,000.00	0	0.00	0	12,109.00	1	3,221.00	0	3,648.00	1	18,978.00	100	99.88	1	18,978.00	100	99.88	
	5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	1	Dokumen	19,000.00	1	19,000.00	19,000.00	0	7,068.00	0	0.00	1	10,147.00	0	1,785.00	1	19,000.00	100	100.00	1	19,000.00	100	100.00	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
 Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
 tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	19,000.00	1	19,000.00	19,000.00	0	0.00	0	5,915.00	1	8,001.00	0	5,058.00	1	18,974.00	100	99.86	1	18,974.00	100	99.86	
	5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	47,223.25	12	47,223.25	47,223.25	3	0.00	3	36,747.00	3	9,907.00	3	327.75	12	46,981.75	100	99.49	12	46,981.75	100	99.49	
	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	36,819.30	4	36,819.30	36,819.30	2	4,305.00	1	20,877.50	1	3,663.13	0	7,917.00	4	36,762.63	100	99.85	4	36,762.63	100	99.85	
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	51	Dokumen	36,254,079.37	51	39,732,867.32	39,870,248.41	11	9,057,618.35	13	12,227,750.30	13	9,123,177.75	14	8,702,888.26	51	39,111,434.65	100	98.10	51	39,111,434.65	100	98.10	Subbag Tata Usaha
	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	14	Dokumen	39,541,328.91	14	39,398,947.82	39,541,328.91	3	8,993,794.05	4	12,163,025.95	4	8,988,679.32	3	8,637,031.84	14	38,782,531.15	100	98.08	14	38,782,531.15	100	98.08	
	5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	14	Dokumen	19,851.00	14	19,851.00	19,851.00	3	4,916.55	4	4,926.45	4	5,896.50	3	4,111.50	14	19,851.00	100	100.00	14	19,851.00	100	100.00	
	5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	3	Dokumen	53,445.00	3	50,023.50	50,023.50	1	5,720.00	1	11,401.73	1	2,737.05	0	30,164.73	3	50,023.50	100	100.00	3	50,023.50	100	100.00	
	5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Dokumen	267,151.50	18	253,145.00	248,145.00	4	53,187.75	4	42,946.18	4	120,414.88	6	31,580.20	18	248,129.00	100	99.99	18	248,129.00	100	99.99	
	5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	11,025.00	2	10,900.00	10,900.00	0	0.00	0	5,450.00	0	5,450.00	2	0.00	2	10,900.00	100	100.00	2	10,900.00	100	100.00	
	5.01.01.1.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan sumber daya aparatur	42	Dokumen	6,457,955	42	1,329,090.00	1,258,752.50	9	250,046.44	10	188,226.70	10	282,761.56	13	459,669.54	42	1,180,704.24	100	93.80	42	1,180,704.24	100	93.80	Kepegawaian
			Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	Orang		126			126		126		126		126		126		100		126		100.00		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV												
				K	Rp. (000)	K	Murni	Pergeseran	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)
							Rp. (000)	Rp. (000)																			
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		
	5.01.01.1.03.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Dokumen	697,882.50	1	226,240.00	226,240.00	0	49,040.00	0	50,530.00	0	46,097.00	1	52,740.00	1	198,407.00	100	87.70	1	198,407.00	100	87.70		
	5.01.01.1.03.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14	Dokumen	4,107,425.14	14	218,110.00	218,110.00	3	92,424.44	4	37,487.95	4	60,325.65	3	26,765.50	14	217,003.54	100	99.49	14	217,003.54	100	99.49		
	5.01.01.1.03.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	330,750.00	12	150,520.00	139,897.50	3	17,170.00	3	11,595.00	3	13,867.90	3	92,513.94	12	135,146.84	100	96.60	12	135,146.84	100	96.60		
	5.01.01.1.03.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	330,750.00	12	98,007.00	98,007.00	3	30,727.00	3	7,303.75	3	13,876.01	3	44,591.01	12	96,497.77	0	98.46	12	96,497.77	0	98.46		
	5.01.01.1.03.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Dokumen	165,375.00	1	418,000.00	372,250.00	0	60,685.00	0	71,810.00	0	133,970.00	1	78,960.00	1	345,425.00	100	92.79	1	345,425.00	100	92.79		
	5.01.01.1.03.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Dokumen	110,250.00	1	175,713.00	161,748.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	152,299.09	1	152,299.09	0	94.16	1	152,299.09	0	94.16		
	5.01.01.1.03.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Dokumen	110,250.00	1	42,500.00	42,500.00	0	0.00	0	9,500.00	0	14,625.00	1	11,800.00	1	35,925.00	100	84.53	1	35,925.00	100	84.53		
	5.01.01.1.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	9	Dokumen	16,336,833.08	9	6,128,696.19	5,990,494.21	0	859,441.96	0	1,454,417.09	0	1,215,210.41	9	2,298,492.12	9	5,827,561.59	100	97.28	9	5,827,561.59	100	97.28	Subbag Tata Usaha	
			Jumlah Pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	0	Bulan		12			3		3		3		3		12		100		12		100			
	5.01.01.1.04.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Laporan	1,524,420.35	1	54,343.00	81,774.90	0	41,722.90	0	8,637.80	0	1,659.00	1	29,660.00	1	81,679.70	100	99.88	1	81,679.70	100	99.88		
	5.01.01.1.04.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan	3,245,185.52	1	1,619,212.06	1,835,686.18	0	174,761.75	0	401,748.56	0	135,608.23	1	1,064,633.19	1	1,776,751.71	100	96.79	1	1,776,751.71	100	96.79		
	5.01.01.1.04.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Laporan	3,468,143.05	1	230,221.45	232,971.45	0	51,248.59	0	53,878.54	0	57,548.42	1	67,559.49	1	230,235.05	100	98.83	1	230,235.05	100	98.83		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	5.01.01.1.04.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Laporan	963,320.40	1	467,080.83	497,964.83	0	69,999.10	0	141,916.60	0	97,406.60	1	188,504.95	1	497,827.25	100	99.97	1	497,827.25	100	99.97	
	5.01.01.1.04.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Laporan	149,388.75	1	144,207.00	144,207.00	0	26,710.00	0	39,580.00	0	40,475.00	1	36,710.00	1	143,475.00	100	99.49	1	143,475.00	100	99.49	
	5.01.01.1.04.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Dokumen	165,375.00	1	111,100.00	111,100.00	0	43,525.00	0	7,338.00	0	38,675.00	1	21,150.00	1	110,688.00	100	99.63	1	110,688.00	100	99.63	
	5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	Dokumen	3,747,013.66	1	3,378,825.00	2,935,993.00	0	413,124.63	0	763,893.74	0	824,372.73	1	837,239.88	1	2,838,630.98	100	96.68	1	2,838,630.98	100	96.68	
	5.01.01.1.04.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1	Dokumen	216,641.25	1	58,956.85	86,046.85	0	27,090.00	0	30,806.85	0	0.00	1	27,790.00	1	85,686.85	100	99.58	1	85,686.85	100	99.58	
	5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Dokumen	666,634.66	1	64,750.00	64,750.00	0	11,260.00	0	6,617.00	0	19,465.44	1	25,244.61	1	62,587.05	100	96.66	1	62,587.05	100	96.66	
	5.01.01.1.05	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	Dokumen	213,551.84	4	148,659.00	148,659.00	1	65,185.14	0	17,520.00	0	46,430.63	3	6,669.00	4	135,804.77	100	91.35	4	135,804.77	100	91.35	Subbag Tata Usaha
	5.01.01.1.05.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	32,796.96	2	27,820.00	27,820.00	1	19,913.64	0	0.00	0	0.00	1	3,760.00	2	23,673.64	100	85.10	2	23,673.64	100	85.10	
	5.01.01.1.05.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	50,321.25	1	73,475.00	73,475.00	0	23,587.50	0	17,520.00	0	27,673.13	1	2,909.00	1	71,689.63	100	97.57	1	71,689.63	100	97.57	
	5.01.01.1.05.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	62,023.50	1	47,364.00	47,364.00	0	21,684.00	0	0.00	0	18,757.50	1	0.00	1	40,441.50	100	85.38	1	40,441.50	100	85.38	
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Dokumen	97,965.00	5	819,210.08	847,515.08	1	51,689.93	1	371,311.65	1	185,680.80	2	213,786.00	5	822,468.38	100	97.04	5	822,468.38	100	97.04	Subbag Tata Usaha
	5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah laporan pengadaan mebel	5	Dokumen	97,965.00	5	819,210.08	847,515.08	1	51,689.93	1	371,311.65	1	185,680.80	2	213,786.00	5	822,468.38	100	97.04	5	822,468.38	100	97.04	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	
1	2	3	4	5			6			7		8		9		10		11		12		13		14		15
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Dokumen	6,811,694.55	36	6,927,656.10	6,824,352.25	9	1,179,862.57	9	1,829,878.53	9	1,460,881.25	9	2,119,591.50	36	6,590,213.84	100	96.57	36	6,590,213.84	100	96.57	Subbag Tata Usaha
	5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	1,480,608.58	12	1,324,549.06	1,135,617.47	3	249,380.34	3	277,525.78	3	256,922.15	3	304,783.22	12	1,088,611.48	100	95.86	12	1,088,611.48	100	95.86	
	5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	410,838.75	12	697,656.00	734,983.75	3	216,612.46	3	151,330.00	3	115,590.00	3	230,182.00	12	713,714.46	100	97.11	12	713,714.46	100	97.11	
	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	4,920,247.22	12	4,905,451.03	4,953,751.03	3	713,869.77	3	1,401,022.76	3	1,088,369.10	3	1,584,626.27	12	4,787,887.90	100	96.65	12	4,787,887.90	100	96.65	
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53	Dokumen	3,284,240.30	53	3,284,447.26	3,501,018.17	0	215,988.70	0	1,021,895.21	0	836,970.10	53	1,348,743.95	53	3,423,597.96	100	97.79	53	3,423,597.96	100	97.79	Subbag Tata Usaha
	5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40	Laporan	1,153,656.00	40	962,500.40	962,500.40	0	195,157.90	0	213,570.42	0	271,945.94	40	281,618.99	40	962,293.26	100	99.98	40	962,293.26	100	99.98	
	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Laporan	148,155.50	1	209,116.00	260,182.00	0	17,669.30	0	43,909.30	0	90,629.00	1	105,978.75	1	258,186.35	100	99.23	1	258,186.35	100	99.23	
	5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Dokumen	1,982,428.79	6	2,092,744.36	2,220,249.27	0	0.00	0	758,447.46	0	469,392.75	6	923,238.45	6	2,151,078.66	100	96.88	6	2,151,078.66	100	96.88	
	5.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Dokumen	-	6	20,086.50	58,086.50	0	3,161.50	0	5,968.03	0	5,002.41	6	37,907.76	6	52,039.69	100	89.59	6	52,039.69	100	89.59	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100	96.27			100	96.27		
																	Predikat kinerja			ST				ST		
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Tingkat kesesuaian perencanaan antar waktu dan level pemerintahan	100	Persen	13,283,847.63	100	14,516,609.65	14,131,539.70	1,200,205.65	4,299,182.49	2,629,013.73		5,543,345.27	100	13,671,747.13	100	96.75	100	13671747.13	100	96.75			Bidang PPEPD	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	35	Dokumen	6081047.64	35	7,423,496.26	7,570,426.31	1	484,381.01	2	922,301.18	27	480,650.75	5	1,842,833.75	35	7,334,157.52	100	96.88	35	7334157.518	100	96.88	Perencanaan dan Pelaporan
	5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2	Dokumen	502,275.40	2	788,906.43	1,512,899.06	0	0	0	365,350.05	0	47,630.12	2	838,289.77	2	1,396,221.74	100	92.29	2	1396221.741	100	92.29	
	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Telaahan Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1	Dokumen	1,275,692.00	1	941,223.16	909,029.16	0	148,448.29	0	136,855.95	0	176,222.09	1	275,342.73	1	893,153.64	100	98.25	1	893153.636	100	98.25	
			Jumlah dokumen fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota	27	Dokumen		27			0		0		27		0		27		100		27				
	5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Dokumen	294,833.00	1	824,800.00	957,429.00	0	0	1	5,168.00	0	0	0	11,149.75	1	924,328.31	100	96.54	1	924328.31	100	96.54	
	5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Dokumen	118,885.80	1	147,412.00	57,696.00	1	0	0	0	0	86,689.50	0	14,619.75	1	50,196.85	100	87.00	1	50196.85	100	87.00	
	5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1	Dokumen	2,333,068.38	1	2,484,649.50	2,214,805.47	0	0	1	224,123.18	0	118,500.00	0	7,460.00	1	2,200,115.55	100	99.34	1	2200115.55	100	99.34	
	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2	Dokumen	1,556,293.06	2	2,236,505.16	1,918,567.61	0	335,932.72	0	190,804.01	0	51,609.04	2	695,971.75	2	1,870,141.43	100	97.48	2	1870141.431	100	97.48	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	
1	2	3	4	5			6			7		8		9		10		11		12		13		14		15
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah kewenangan provinsi yang dikelola dalam SIPD	6	Dokumen	2,530,000.00	6	3,185,961.01	3,185,961.01	0	145,241.28	0	301,433.59	2	406,992.16	4	391,379.78	6	3,135,682.99	100	98.42	6	3135682.986	100	98.42	Data dan Informasi
	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	2,200,000.00	1	1,936,749.00	1,963,679.00	0	145,241.28	0	166,433.59	1	190,292.16	0	186,247.61	1	1,943,866.28	100	98.99	1	1943866.281	100	98.99	
	5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1	Dokumen	110,000.00	1	459,984.00	433,054.00	0	0	0	69,000.00	0	0	1	23,675.90	1	422,846.40	100	97.64	1	422846.403	100	97.64	
			Jumlah dokumen Forum Satu Data Indonesia Jawa Barat	1	Dokumen		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
	5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	220,000.00	1	499,767.01	499,767.01	0	0	0	66,000.00	1	216,700.00	0	181,456.28	1	494,518.58	100	98.95	1	494518.58	100	98.95	
			Jumlah dokumen Forum Satu Data Indonesia Jawa Barat	1	Dokumen		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
	5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	1	Dokumen		1	289,461.00	289,461.00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	274,451.72	100	94.81	1	274451.722	100	94.81	
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan daerah	20	Dokumen	4,672,800.00	20	3,907,152.38	3,375,152.38	5	308,564.50	5	578,375.50	5	486,187.55	5	857,972.26	20	3,201,906.62	100	94.87	20	3201906.623	100	94.87	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
	5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	4	Dokumen	1,100,000.00	4	566,241.98	538,041.98	1		1	4,274.00	1	9,972.00	1	55,697.06	4	503,714.85	100	93.62	4	503714.846	100	93.62	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12	Dokumen	3,242,800.00	12	2,902,680.40	2,600,880.40	3	308,564.50	3	574,101.50	3	476,215.55	3	798,122.70	12	2,475,887.70	100	95.19	12	2475887.702	100	95.19	
	5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	330,000.00	4	438,230.00	236,230.00	1	0	1	0	1	0	1	4,152.50	4	222,304.08	100	94.10	4	222304.075	100	94.10	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100	96.72			100	96.72	
																		Predikat kinerja		ST				ST		
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	100	Persen	18,614,705.84	100	13,883,762.92	13,994,851.92		2,063,556.41		2,647,048.49		3,721,642.75		5,144,071.93	100	13,576,319.58	100	97.01	100	13576319.58	100	97.01	
			2. Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;	100	Persen		100											100		100		100		100		
			3. Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen		100											100		100		100		100		
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	24	Dokumen	5,161,200.00	24	5,335,538.00	5,254,928.00	2	816,945.53	3	949,238.63	3	1,394,637.33	16	1,748,297.86	24	4,909,119.36	100	93.42	24	4909119.355	100	93.42	Bidang PPM



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	
1	2	3	4	5			6			7		8		9		10		11		12		13		14		15
	5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	2,068,000.00	1	400,000.00	400,000.00	0	198,936.93	0	4,626.30	0	25,855.60	1	108,369.03	1	337,787.86	100	84.45	1	337787.862	100	84.45	
			Jumlah dokumen Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat	2	Dokumen		2			0		0		0		2		2		100		2		100		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan Daerah melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat	1	Dokumen		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
	5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan semester hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Dokumen	247,500.00	4	200,000.00	200,000.00	0	0	1	84,470.00	1	31,062.50	2	164,628.33	4	280,160.83	100	140.08	4	280160.83	100	140.08	
	5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	Dokumen	599,500.00	1	700,000.00	700,000.00	0	131,980.44	0	51,791.19	0	93,689.34	1	322,366.72	1	599,827.69	100	85.69	1	599827.69	100	85.69	
			Jumlah Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustaina ble Development Goals Provinsi Jawa Barat	1	Laporan		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
	5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	770,000.00	1	1,900,000.00	1,819,390.00	0	375,054.65	0	431,525.83	0	395,550.70	1	509,016.03	1	1,711,147.20	100	94.05	1	1711147.203	100	94.05	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen semester hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8	Dokumen	247,500.00	8	200,000.00	200,000.00	2	0.00	2	13,677.16	2	83,756.91	2	91,092.59	8	188,526.65	100	94.26	8	188526.651	100	94.26	
	5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Dokumen	1,228,700.00	1	1,935,538.00	1,935,538.00	0	148,137.68	0	287,346.49	0	602,145.00	1	779,450.88	1	1,817,080.05	100	93.88	1	1817080.047	100	93.88	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1	Laporan		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan kegiatan Komda Lansia	1	Laporan		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)	1	Dokumen		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat	1	Dokumen		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	20	Dokumen	6,172,505.84	20	3,473,970.25	3,685,669.25	0	402,855.95	0	532,826.95	0	1,004,564.01	20	1,710,145.38	20	3,650,392.29	100	99.04	20	3650392.292	100	99.04	Bidang PSDA
	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	3,189,677.48	1	568,462.70	844,582.70	0	64,857.70	0	148,787.77	0	201,623.95	1	428,351.37	1	843,620.80	100	99.89	1	843620.796	100	99.89	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			Dokumen Rancangan Peta Jalan Pengembangan Perekonomian Jawa Barat Tahun 2023-2028	1	Dokumen		1		0		0		0		1		1		100		1		100			
	5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan semester hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	Dokumen	746,956.98	6	146,565.00	136,556.50	0	6,234.00	0	15,568.50	0	44,602.75	6	69,289.20	6	135,694.45	100	99.37	6	135694.454	100	99.37	
	5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen	1,033,779.74	1	971,512.60	1,022,056.60	0	126,411.40	0	174,550.04	0	279,642.14	1	430,108.66	1	1,010,712.24	100	98.89	1	1010712.237	100	98.89	
			Jumlah dokumen perencanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	1	Dokumen		1		0		0		0		1		1		100		1		100			
			Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan CSR	1	Dokumen		1		0		0		0		1		1		100		1		100			
			Jumlah dokumen ekonomi outlook 2023	1	Dokumen		1		0		0		0		1		1		100		1		100			
	5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1	Dokumen	562,021.02	1	1,186,965.77	1,166,776.97	0	53,137.28	0	132,386.24	0	388,441.15	1	581,825.43	1	1,155,790.10	100	99.06	1	1155790.095	100	99.06	
			Jumlah Dokumen Rancangan Peta Jalan Pengembangan Sumber Daya Alam Jawa Barat Tahun 2023-2028	1	Dokumen		1		0		0		0		1		1		100		1		100			
	5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan semester hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	4	Dokumen	291,740.90	4	161,287.50	161,287.50	0	25,308.92	0	27,042.40	0	54,475.97	4	53,544.75	4	160,372.04	100	99.43	4	160372.038	100	99.43	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1	Dokumen	348,329.73	1	439,176.68	354,408.98	0	126,906.65	0	34,492.00	0	35,778.05	1	147,025.97	1	344,202.67	100	97.12	1	344202.672	100	97.12	
			Jumlah dokumen Sinergitas program Petani Milenial	1	Dokumen		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	12	Dokumen	7,281,000.00	12	5,074,254.66	5,054,254.66	0	843,754.93	0	1,164,982.90	0	1,322,441.41	12	1,685,628.69	12	5,016,807.94	100	99.26	12	5016807.937	100	99.26	Bidang Infrastwil
	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	1,200,000.00	1	293,816.58	290,416.58	0	57,294.06	0	91,580.49	0	70,283.12	1	66,846.84	1	286,004.51	100	98.48	1	286004.509	100	98.48	
	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen semester hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	4	Dokumen	750,000.00	4	366,157.20	362,857.20	0	88,437.99	0	42,560.96	0	71,608.96	4	158,182.35	4	360,790.26	100	99.43	4	360790.261	100	99.43	
	5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	881,000.00	1	732,315.58	728,915.58	0	183,783.95	0	170,734.69	0	203,340.16	1	158,991.13	1	716,849.93	100	98.34	1	716849.93	100	98.34	
	5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	1,200,000.00	1	420,558.44	417,258.44	0	42,300.30	0	109,931.65	0	116,052.00	1	146,065.00	1	414,348.95	100	99.30	1	414348.95	100	99.30	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2023		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen semester hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	2	Dokumen	750,000.00	2	343,447.01	340,147.01	0	42,146.28	0	66,220.25	0	78,740.42	2	150,094.06	2	337,201.01	100	99.13	2	337201.014	100	99.13	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Cilamaya, dan DAS Kali Bekasi	1	Dokumen		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
			Jumlah Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas rumah Kaca (PEP RAD-GRK) Tahun 2022	1	Dokumen		1			0		0		0		1		1		100		1		100		
	5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	Dokumen	1,500,000.00	1	2,917,959.86	2,914,659.86	0	429,792.35	0	683,954.86	0	782,416.75	1	1,005,449.31	1	2,901,613.27	100	99.55	1	2901613.273	100	99.55	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100	97.24				100	97.24	
																	Predikat kinerja			ST				ST		
												Rata-rata capaian kinerja (%)							100	96.74				100	96.74	
												Predikat kinerja							ST	ST				ST	ST	
												JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)				85,968,405.20		97.45								
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)						100	97.45							
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							ST	ST						

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 triwulan IV, diperoleh hasil yang menggambarkan rata-rata tingkat capaian kinerja di seluruh program sebesar 100% dan rata-rata tingkat capaian/penyerapan anggaran kegiatan di seluruh program sebesar 97,45%.

2.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 s.d. Triwulan II

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merencanakan 3 program, 14 kegiatan, dan 69 subkegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 3 program, 14 kegiatan, dan 69 subkegiatan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, disajikan dalam tabel di bawah ini.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

C5F868F5F2

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keteranga n
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
																	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
	5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			293.144.173,93		83.261.801,82	0,00		17.739.576,08		21.979.235,24					39.718.811,32		47,70		39.718.811,32		13,55			
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN															39.718.811,32									
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;	A	Katageori	198.544.305,42	BB	57.350.392,86	0,00		14.507.845,90		15.966.286,20				30.474.132,10		53,14		30.474.132,10		15,35	Sekretariat		
			2. Persentase Belanja PDN Bappeda Jabar;	98	Persen		90																			
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	AA	Poin	8.848.185,62	A	1.486.800,00	-	7	479.058,75	4	443.552,03			11	922.610,78	39,29	62,05	11	922.610,78	13,10	10,43	Sekretariat		
	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	6.944.794,78	8	1.352.963,00	0,00	3	452.453,75	0	411.261,37			3	863.715,12	37,50	63,84	3	863.715,12	12,50	12,44			
	5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	145.640,00	1	12.810,00	0,00	0	2.361,50	0	-			0	2.361,50	0,00	18,43	0	2.361,50	0,00	1,62			
	5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	145.640,00	1	12.810,00	0,00	0	-	0	-			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
	5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	145.640,00	1	12.810,00	0,00	0	-	0	-			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00			



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang ung Jawab	Keterangan
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
	5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	145.640,00	1	12.810,00	0,00	0	-	0	-			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
	5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	Laporan	586.608,96	12	48.785,00	0,00	3	16.846,80	3	18.536,50			6	35.383,30	50,00	72,53	6	35.383,30	16,67	6,03			
	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	734.221,88	4	33.812,00	0,00	1	7.396,70	1	13.754,16			2	21.150,86	50,00	62,55	2	21.150,86	16,67	2,88			
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	97,60	Persen	119.684.064,36	97,50	41.317.942,74	-	14	11.315.387,14	13	11.005.744,92			27	22.321.132,06	51,92	54,02	27	22.321.132,06	17,31	18,65	Subbag Tata Usaha		
			Persentase TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100	Persen		100																			
	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	42	Dokumen	118.196.843,46	14	40.984.023,24	0,00	4	11.206.566,46	4	10.967.841,62			8	22.174.408,08	57,14	54,11	8	22.174.408,08	19,05	18,76			
	5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42	Dokumen	72.277,49	14	20.920,00	0,00	4	3.899,00	4	1.239,00			8	5.138,00	57,14	24,56	8	5.138,00	19,05	7,11			
	5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Dokumen	66.200,00	0	-		0	-	0	-			0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0,00	0,00			
	5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	Dokumen	72.820,00	0	-		0	-	0	-			0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0,00	0,00			
	5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	132.400,00	1	23.407,00	0,00	1	5.218,40	0	5.218,60			1	10.437,00	1,00	132,40	1	10.437,00	33,33	7,88			



C5F868F5F2

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
1	2	3	4	5			7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
	5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	182.136	3	39.600,00	0,00	1	-	0	-			1	0,00	33,33	0,00	1	0,00	33,33	0,00				
	5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	54	Laporan	921.700,95	18	245.498,00	0,00	4	99.703,28	5	31.445,70			9	131.148,98	50,00	53,42	9	131.148,98	16,67	14,23				
	5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	39.686,90	2	4.494,50	0,00	0	-	0	-			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
																		0									
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi	100	Persen	701.925,22	100	99.896,14	0,00	1	25.565,50	1	28.751,50			2	54.317,00	40,00	54,37	2	54.317,00	13,33	7,74	Subbag Tata Usaha			
	5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	234.394,34	2	17.620,00	0,00	0	-	1	13.224,00			1	13.224,00	0,00	75,05	1	13.224,00	16,67	5,64				
	5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	297.502,80	1	42.069,40	0,00	0	9.105,00	0	15.527,50			0	24.632,50	0,00	58,55	0	24.632,50	0,00	8,28				
	5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	6	Laporan	170.028,08	2	40.206,74	0,00	1	16.460,50	0	-			1	16.460,50	0,00	40,94	1	16.460,50	16,67	9,68				
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	92,64	Poin	4.466.409,74	92,61	1.187.472,01	-	0	116.978,22	28	303.894,07			28	420.872,29	30	35,44	28	420.872,29	30	9,42	Sekretariat			
	5.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	Unit	892.786,44	0	-	-	0	-	0	-														
	5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	581.510,73	2	274.392,05	0,00	0	46.603,16	1	52.015,12			1	98.618,28	50,00	35,94	1	98.618,28	16,67	16,96				
	5.01.01.1.03.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	Dokumen	666.986,52	2	223.063,68	0,00	0	26.744,28	1	55.720,62			1	82.464,90	50,00	36,97	1	82.464,90	16,67	12,36				



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keteranga n			
									I	II		III											IV		
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
	5.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	Dokumen	1.676.680,50	2	263.134,28	0,00	0	28.310,78	1	91.539,92			1	119.850,70	50,00	45,55	1	119.850,70	16,67	7,15		
	5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen hasil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	177	Orang	648.445,55	50	319.094,00	0,00	0	15.320,00	25	104.618,41			25	119.938,41	50,00	37,59	25	119.938,41	14,12	18,50		
	5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	630	Orang	-	200	107.788,00	0,00	0	-	0	-			0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!		
	5.01.01.1.05.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	-	0	-	0,00	0	-	0	-			0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!		
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasaranan dan Sarana yang Terpenuhi	100	Persen	21.046.155,94	100	3.956.317,34	-	0	687.401,02	0	1.152.370,91			0	1.839.771,93	0	46,50	0	1.839.771,93	0	8,74	Subbag Tata Usaha	
			Nilai SKM Perangkat Daerah	96,50	Poin		95,50			0		0				0		0	0		0				
			Nilai Audit Kersipan Internal Perngkat Daerah	80,33	Poin		80,29			0		0				0		0	0		0				
			Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi	100	Persen		100			0		0				0		0	0		0				
			Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	90,06	Poin		90,02			0		0				0		0	0		0				
	5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	234.272,86	1	80.028,00	0,00	0	12.000,00	0	48.000,00			0	60.000,00	0,00	74,97	0	60.000,00	0,00	25,61		
	5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	2.028.231,14	1	629.842,57	0,00	0	101.765,80	0	163.555,45			0	265.321,25	0,00	42,13	0	265.321,25	0,00	13,08		
	5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	838.236,30	1	228.299,80	0,00	0	39.477,37	0	51.809,65			0	91.287,02	0,00	39,99	0	91.287,02	0,00	10,89		
	5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	1.700.641,32	1	366.932,80	0,00	0	60.815,90	0	131.093,70			0	191.909,60	0,00	52,30	0	191.909,60	0,00	11,28		
	5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	Dokumen	525.057,69	0	-	0,00	0	-	0	-			0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0,00	0,00		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang ung Jawab	Keterangan	
									I		II		III												IV
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
	5.01.01.1.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	Laporan	404.515,10	1	206.622,00	0,00	0	32.250,00	0	118.270,00			0	150.520,00	0,00	72,85	0	150.520,00	0,00	37,21		
	5.01.01.1.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	14.834.409,79	1	2.011.897,44	0,00	0	345.684,51	0	554.744,12			0	900.428,63	0,00	44,76	0	900.428,63	0,00	6,07		
	5.01.01.1.06.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	245.037,00	1	161.128,89	0,00	0	33.129,28	0	35.649,23			0	68.778,51	0,00	42,69	0	68.778,51	0,00	28,07		
	5.01.01.1.06.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	235.754,75	1	271.565,84	0,00	0	62.278,16	0	49.248,77			0	111.526,93	0,00	41,07	0	111.526,93	0,00	47,31		
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100	Persen	5.770.188,30	100	1.582.479,00	0,00	0	153.700,60	0	1.295.100,00			0	1.448.800,60	0	91,55	0	1.448.800,60	0	25,11	Subbag Tata Usaha	
			Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Berspesifikasi PDN	91	Persen		90																		
	5.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	-	1	1.132.560,00	0,00	0	-	0	1.035.100,00			0	1.035.100,00	0,00	0,00	0	1.035.100,00	0,00	#DIV/0!		
	5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang Disediakan	3	Paket	838.605,00	1	288.600,00	0,00	0	-	0	260.000,00			0	260.000,00	0,00	0,00	0	260.000,00	0,00	31,00		
	5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	189	Paket	4.931.583,30	139	161.319,00	0,00	0	153.700,60	0	-			0	153.700,60	0,00	0,00	0	153.700,60	0,00	3,12		
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan Komunikasi Terpenuhi	12	Dokumen	26.047.335,69	100	6.396.052,13	0,00	0	1.433.979,03	0	1.423.852,94			0	2.857.831,97	0,00	44,68	0	2.857.831,97	0,00	10,97	Subbag Tata Usaha	
	5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	4.822.683,14	1	1.171.536,28	0,00	0	223.472,18	0	279.954,44			0	503.426,62	0,00	42,97	0	503.426,62	0,00	10,44		
	5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.540.165,50	1	227.380,00	0,00	0	142.292,40	0	38.310,00			0	180.602,40	0,00	79,43	0	180.602,40	0,00	7,11		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keterangan
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	18.684.487,05	1	4.997.135,85	0,00	0	1.068.214,45	0	1.105.588,50			0	2.173.802,95	0,00	43,50	0	2.173.802,95	0,00	11,63			
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	Persen	11.980.040,56	100	1.323.433,50	0,00	0	295.775,64	0	313.019,83			0	608.795,47	0,00	46,00	0	608.795,47	0,00	5,08	Subbag Tata Usaha		
	5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	270	Unit	3.504.462,50	90	1.093.222,50	0,00	0	264.217,24	0	233.928,58			0	498.145,82	0,00	45,57	0	498.145,82	0,00	14,21			
	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	270	Unit	783.237,36	100	185.711,00	0,00	0	25.058,40	0	68.091,25			0	93.149,65	0,00	50,16	0	93.149,65	0,00	11,89			
	5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	7.692.340,70	1	44.500,00	0,00	0	6.500,00	0	11.000,00			0	17.500,00	0,00	39,33	0	17.500,00	0,00	0,23			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		20,18	54,33			9,25	12,02			
																Predikat kinerja		SR	R			SR	SR			
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	13,48	Poin	44.190.400,00	13,41	13.666.182,15	0,00		1.495.068,07		3.528.515,49				5.023.583,56	36,76			5.023.583,56	11,37		Bidang PPEPD		
			Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	11,44	Poin		11,37																			
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi	8,00	Poin	22.100.000,00	7,93	8.884.742,62	0,00	4	1.080.612,89	2	2.848.254,68			6	3.928.867,57	9,84	44,22	6	3.928.867,57	33,33	17,78			
			Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi	100	Persen		100																			
			Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	100	Persen		100																			
	5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	6	Dokumen	2.350.000,00	2	1.000.019,00	0,00	2	124.441,13	0	69.359,61			2	193.800,74	100,00	19,38	2	193.800,74	33,33	8,25			



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keterangan
									I		II		III		IV											
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 ÷ 12		15 = 14/5*100		16	17		
	5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	2.850.000,00	54	690.069,90	0,00	0	43.200,00	0	81.793,07			0	124.993,07	0,00	0,00	0	124.993,07	0,00	0,00			
	5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	1.750.000,00	1	699.300,40	0,00	1	604.735,00	0	30.130,00			1	634.865,00	100,00	90,79	1	634.865,00	33,33	36,28			
	5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Berita Acara	450.000,00	1	99.999,80	0,00	1	-	0	-			1	0,00	100,00	0,00	1	0,00	33,33	0,00			
	5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	3	Berita Acara	7.500.000,00	1	3.037.073,00	0,00	0	2.300,00	1	2.155.261,36			1	2.157.561,36	100,00	71,04	1	2.157.561,36	33,33	28,77			
	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen	7.200.000,00	2	3.358.280,52	0,00	0	305.936,76	1	511.710,64			1	817.647,40	50,00	24,35	1	817.647,40	50,00	11,36			
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Provinsi yang sesuai Ketentuan	100	Persen	8.390.400,00	100	1.928.976,22	0,00	38	146.575,65	-	320.558,89			38	467.134,54	28,79	24,22	38	467.134,54	28,36	5,57			
			Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	100	Persen		100																			
	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	2	Dokumen	3.920.500,00	1	887.632	0,00	0	89.154,82	-	237.392,12			0	326.546,94	0,00	36,79	0	326.546,94	0,00	8,33			
	5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	76	Orang	1.645.400,00	76	391.344	0,00	38	22.303,00	-	50.648,84			38	72.951,84	50,00	18,64	38	72.951,84	50,00	4,43			
	5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	54	Orang	1.787.500,00	54	350.000	0,00	0	35.117,83	-	10.650,00			0	45.767,83	0,00	13,08	0	45.767,83	0,00	2,56			
	5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	2	Buku	1.037.000,00	1	300.000	0,00	0	-	-	21.867,93			0	21.867,93	0,00	7,29	0	21.867,93	0,00	2,11			



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang ung Jawab	Keterangan		
										I		II		III												IV	
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K			Rp. (000)	
1	2	3	4	5			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Provinsi	8,30	Poin	13.700.000,00	8,25	2.852.463,31	0,00	5	267.879,53	5	359.701,92					10	627.581,45	50,00	22,00	10	627.581,45	17,54	4,58			
		Persentase Dokumen Pengendalian dan Evluasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Sesuai Ketentuan	100	Persen		100																					
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13	Laporan	2.600.000,00	4	931.925,17	0,00	1	69.966,75	1	117.062,00					2	187.028,75	50,00	20,07	2	187.028,75	15,38	7,19			
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	36	Dokumen	9.300.000,00	12	1.621.137,33	0,00	3	168.297,78	3	227.031,42					6	395.329,20	50,00	24,39	6	395.329,20	16,67	4,25			
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota nyang Difasilitasi/Evaluasi	8	Dokumen	1.800.000,00	4	299.400,81	0,00	1	29.615,00	1	15.608,50					2	45.223,50	50,00	15,10	2	45.223,50	25,00	2,51			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		29,54	30,15					26,41	9,31				
														Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR				
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13,59	Poin	50.409.468,51	13,52	12.245.226,81	0,00		1.736.662,11		2.484.433,56					4.221.095,67		34,47		4.221.095,67		8,37				
		Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11,97	Poin		11,90																					
		Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	13,33	Poin		13,26																					
		Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9,94	Poin		9,87																					
		Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13,31	Poin		13,24																					



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keterangan	
									I		II		III												IV
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
1	2	3	4	5			7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
			Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12,02	Poin		11,95																		
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		8,00	Poin	21.515.000,00	7,93	3.927.504,80	0,00	0	616.829,20	0	826.515,51			0	1.443.344,71	0	6,71	0	1.443.344,71	0,00	6,71	Bidang PPM	
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan		100	Persen		100																		
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100	Persen		100																		
		Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		8,34	Poin		8,27																		
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		3	Dokumen	6.454.500,00	2	1.900.000,00	0,00	0	298.289,17	0	335.513,53			0	633.802,70	0	33,36	0	633.802,70	0,00	9,82		
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan		42	Perangkat Daerah	1.655.000,00	14	200.000,00	0,00	0	13.336,63	0	17.863,53			0	31.200,15	0	15,60	0	31.200,15	0,00	1,89		
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		3	Dokumen	3.641.000,00	3	400.000,00	0,00	0	84.085,86	0	101.302,29			0	185.388,14	0	46,35	0	185.388,14	0,00	5,09		
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		3	Dokumen	1.489.500,00	1	300.000,00	0,00	0	53.023,86	0	102.908,47			0	155.932,33	0	51,98	0	155.932,33	0,00	10,47		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keteranga n			
									I		II												III		IV
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
	5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	24	Perangkat Daerah	1.655.000,00	8	200.000,00	0,00	0	7.863,05	0	68.545,73			0	76.408,78	0	38,20	0	76.408,78	0,00	4,62		
	5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3	Dokumen	6.620.000,00	1	927.504,80	0,00	0	160.230,64	0	200.381,96			0	360.612,60	0	38,88	0	360.612,60	0,00	5,45		
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8,08	Poin	13.020.000,00	8,01	2.544.592,00	0,00	0	426.025,51	0	864.792,80			0	1.290.818,31	0	50,73	0	1.290.818,31	0,00	9,91	Bidang PSDA	
			Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen		100																		
			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen		100																		
			Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8,11	Poin		8,04																		
	5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3	Dokumen	2.850.000,00	3	397.191,68	0,00	0	90.913,79	0	125.921,95			0	216.835,74	0	54,59	0	216.835,74	0,00	7,61		
	5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	18	Perangkat Daerah	900.000,00	8	104.670,00	0,00	0	5.942,50	0	42.969,70			0	48.912,20	0	46,73	0	48.912,20	0,00	5,43		
	5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3	Dokumen	3.450.000,00	1	1.027.343,42	0,00	0	155.570,18	0	340.583,40			0	496.153,57	0	48,29	0	496.153,57	0,00	14,38		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keteranga n			
									I	II		III											IV		
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
	5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	3.000.000,00	1	520.098,00	0,00	0	94.900,38	0	146.574,72			0	241.475,10	0	46,43	0	241.475,10	0,00	8,05		
	5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber Daya Alam	12	Perangkat Daerah	900.000,00	4	104.778,00	0,00	0	7.526,00	0	58.658,83			0	66.184,83	0	63,17	0	66.184,83	0,00	7,35		
	5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam	3	Dokumen	1.920.000,00	1	390.510,90	0,00	0	71.172,67	0	150.084,21			0	221.256,87	0	56,66	0	221.256,87	0,00	11,52		
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8,19	Poin	15.874.468,51	8,12	5.773.130,01	0,00	0	693.807,41	0	793.125,25			0	1.486.932,65	0	25,76	0	1.486.932,65	0,00	9,37	Bidang Infrastwil	
			Persentase Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen		100																		
			Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen		100																		
			Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8,71	Poin		8,64																		
	5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	1.533.154,26	1	370.107,62	0,00	0	38.098,36	0	76.608,16			0	114.706,52	0	30,99	0	114.706,52	0,00	7,48		
	5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	12	Dokumen	1.098.471,60	4	384.098,24	0,00	0	63.399,88	0	53.345,63			0	116.745,50	0	30,39	0	116.745,50	0,00	10,63		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	Keterangan			
									I	II	III	IV													
				K	Rp. (000)	K	Murni Rp. (000)	Pergeseran Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		7			8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
	5.01.03.1.03.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	3	Dokumen	2.196.946,75	1	757.056,62	0,00	0	133.354,90	0	159.273,72			0	292.628,62	0	38,65	0	292.628,62	0,00	13,32		
	5.01.03.1.03.05	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	Dokumen	1.261.675,31	1	448.679,48	0,00	0	78.239,49	0	103.519,80			0	181.759,29	0	40,51	0	181.759,29	0,00	14,41		
	5.01.03.1.03.07	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	Dokumen	1.030.341,03	2	313.188,05	0,00	0	63.738,16	0	87.923,20			0	151.661,36	0	48,43	0	151.661,36	0,00	14,72		
	5.01.03.1.03.08	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	3	Dokumen	8.753.879,58	1	3.500.000,00	0,00	0	316.976,63	0	312.454,73			0	629.431,36	0	17,98	0	629.431,36	0,00	7,19		
															Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	27,73			0,00	8,66			
															Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR			

Rata-rata capaian kinerja (%)	17,86	44,18			11,10	10,52		
Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR		
JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	39.718.811,32	47,70			39.718.811,32	13,55		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	16,57	47,70			11,89	13,55		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	SR	SR			SR	SR		

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 triwulan II, diperoleh hasil yang menggambarkan rata-rata tingkat capaian kegiatan di seluruh program sebesar 44,18% dan rata-rata tingkat capaian/penyerapan anggaran kegiatan di seluruh program sebesar 47,70%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas Dekonsentrasi dan melaksanakan Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat, meliputi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
2. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan;
4. Penyelenggaraan administrasi Badan;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	-	-	85	87	89	98,50	N/A	98,03	99,10	N/A	N/A
2	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	-	-	-	28	28	25,80	25,90	25,70	25,85	25,90	26,00
3	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	-	-	100	100	100	100	N/A	100	100	N/A	N/A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat terdapat 2 (dua) indikator yang disesuaikan (tidak digunakan kembali) pada Tahun 2025. Pertama, untuk indikator Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran tidak digunakan kembali. Kedua, untuk indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat digantikan dengan indikator Komponen pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi dengan target 26,59 (Tahun 2024) dan 26,69 (Tahun 2025).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat telah mencapai target yang ditetapkan, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara optimal forum koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena beberapa tahapan dalam proses



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

perencanaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Renja.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu antara lain:

1. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada saat ini belum ideal bila dibandingkan dengan tingginya beban kerja yang diampu oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut, penggunaan sumber daya menjadi terpecah dalam upaya Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan optimal. Akibatnya, kondisi ini berpengaruh pada pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di setiap unit kerja;
2. Adanya pelaksanaan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan komposisi sumber daya manusia yang sama. Hal ini didasari pada penjelasan poin a yaitu terdapat permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya aparatur; dan
3. Adanya penyesuaian terhadap implementasi penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada transformasi kelembagaan serta penyesuaian mekanisme kerja untuk memastikan keberlangsungan tugas pokok dan fungsi.

Namun demikian, Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan, yang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. **Faktor Internal**, meliputi :

Kekuatan:

1. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang sudah sesuai dengan ketentuan;
2. Cakupan tugas pokok dan fungsi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
3. Cakupan wilayah kerja meliputi 27 Kabupaten/kota dan 46 Perangkat Daerah/Biro Pemerintah Provinsi Jawa Barat;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

4. Kapasitas sebagian sumber daya manusia yang dimiliki cukup baik;
5. Fasilitas yang cukup memadai; dan
6. Penggunaan teknologi informasi, optimalisasi data dan penguatan analisis untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Kelemahan:

1. Jumlah sumber daya manusia yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja di masing-masing bidang;
2. Kualitas sumber daya perencana masih belum merata dan belum dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan;
3. Pemanfaatan hasil evaluasi, riset dan analisis data dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
4. Pengumpulan data pembangunan dari Perangkat Daerah/Biro dan Kabupaten/kota belum optimal; dan
5. Sinergitas perencanaan pada Perangkat Daerah/Biro dalam perencanaan maupun penganggaran dan pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara sistematis.

Faktor Eksternal, yang meliputi :

Peluang:

1. Koordinasi dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi di wilayah perbatasan, dan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan pembangunan terjalin dengan baik;
2. Amanat peraturan perundang-undangan terkait perencanaan;
3. Dukungan *stakeholder* atau seluruh unsur (baik akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas serta media) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
4. Inovasi dalam mendukung tuntutan kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Ancaman dan Tantangan :

1. Disrupsi, baik *digital disruption* dari revolusi industri 4.0 ke *Society 5.0*, *millennial disruption*, maupun *pandemic disruption* dimana penyesuaian kebiasaan baru pasca pandemic COVID-19;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

2. Dinamika perekonomian dan politik global; dan
3. Perubahan iklim.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas perumusan program dan kegiatan perencanaan, yang perlu dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergi bersama perangkat daerah serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui forum diskusi yang efektif untuk menyepakati kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat. Selain itu, perlu penguatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian dan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi dalam mendukung perumusan perencanaan pembangunan. Peningkatan kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat dan indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat perlu dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound (SMART)* dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Inisiatif strategis untuk menangani dan mengatasi isu-isu tersebut diatas perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik perangkat daerah maupun *stakeholder* terkait perencanaan pembangunan di Jawa Barat, dan sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran seluruh *stakeholder* terkait (DPRD, Perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya). Data-data yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dokumen perencanaan pembangunan perlu disosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat.

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mensukseskan pembangunan di Jawa Barat berkewajiban meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan terhadap rencana pembangunan juga dapat menyelaraskan rencana pembangunan provinsi, nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat kedepannya dalam



rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing bidang perencanaan di Bappeda Provinsi Jawa Barat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. *Review* terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk menelaah kesesuaian dengan kebutuhan, yang hasilnya menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2025. Proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda Provinsi Jawa Barat yang tercantum di dalam RKPD Tahun 2025;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappeda Provinsi Jawa Barat yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat hasil *review* terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri



Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa setiap perangkat daerah diminta melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat beberapa indikator kinerja dan target capaian pada level kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut merupakan hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025. Adapun untuk lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD								Hasil analisis Kebutuhan							Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	13,44	Poin	13.745.561.139	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	13,44	Poin	12.500.840.000	-	
			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	11,40	Poin				Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	11,40	Poin		-	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi	7,96	Poin	9.352.921.616	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi	7,96	Poin	7.997.522.000	-	
			Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	100	Persen				Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	100	Persen			
			Jawa Barat	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi	100	Persen				Jawa Barat	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi	100	Persen			
		1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	2	Dokumen			1.079.398.000	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	2	Dokumen	1.148.310.000	
		2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jawa Barat	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Dokumen			1.078.869.900	Jawa Barat	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Dokumen	724.192.040	-
		3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jawa Barat	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara			699.300.400	Jawa Barat	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	Berita Acara	700.000.000	-
		4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jawa Barat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara			99.999.800	Jawa Barat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	100.000.000	-
		5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jawa Barat	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2	Berita Acara			3.037.073.000	Jawa Barat	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2	Berita Acara	2.500.000.000	-
		6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6	Dokumen			3.358.280.516	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6	Dokumen	2.825.019.960	-
		2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jawa Barat	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Provinsi yang sesuai Ketentuan	100			Persen	1.928.976.216	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jawa Barat	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Provinsi yang sesuai Ketentuan	100
Jawa Barat	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan				100	Persen	Jawa Barat	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	100	Persen				-		
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Jawa Barat	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4	Dokumen	887.632.400	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4			Dokumen	850.000.000	-



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Rancangan Awal RKPD								Hasil analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3		4	5		6	7	8	9		10	11		12		13	14
		2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jawa Barat	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	76	orang	391.343.816			2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jawa Barat	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	76	orang	500.000.000	-
		3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Jumlah sumber daya manusia pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	54	orang	350.000.000			3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Jumlah sumber daya manusia pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	54	orang	500.000.000	-
		4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jawa Barat	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1	buku	300.000.000			4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jawa Barat	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1	buku	500.000.000	-
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Provinsi	8,30	Poin	2.463.663.307	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Provinsi	8,30	Poin	2.153.318.000	-
				Jawa Barat	Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Kab/Kota yang sesuai Ketentuan	100	Persen					Jawa Barat	Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Kab/Kota yang sesuai Ketentuan	100	Persen		-	
		1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jawa Barat	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	Laporan	484.242.000			1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jawa Barat	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	Laporan	811.088.000	-
		2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jawa Barat	jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	12	Laporan	1.680.020.500			2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jawa Barat	jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	12	Laporan	1.000.000.000	-
		3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/kota yang difasilitasi/evaluasi	4	Dokumen	299.400.807			3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/kota yang difasilitasi/evaluasi	4	Dokumen	342.230.000	-
2		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13,55	Poin			12.245.226.800	2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13,55
			Jawa Barat	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11,93	Poin			Jawa Barat	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11,93			Poin		-		
			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	13,29	Poin			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	13,29			Poin				
			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	9,90	Poin			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	9,90			Poin		-		
			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	13,27	Poin			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	13,27			Poin		-		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Rancangan Awal RKPD							Hasil analisis Kebutuhan							Catatan Penting		
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12			13	14
			Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	11,98	Poin				Jawa Barat	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	11,98	Poin		-	
4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7,88	Poin	3.927.504.800	4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7,88	Poin	18.698.000.000	-
			Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan	100	Persen				Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan	100	Persen		-	
			Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8,31	Poin				Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8,31	Poin			
			Jawa Barat	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen				Jawa Barat	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen			
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	1.900.000.000		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	16.898.000.000	-
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jawa Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pemerintahan	4	Laporan	200.000.000		2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	200.000.000	-
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jawa Barat	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	9	Laporan	400.000.000		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	9	Laporan	300.000.000	-
	4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	300.000.000		4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	400.000.000	-
	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jawa Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia	4	Laporan	200.000.000		5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	200.000.000	-
	6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jawa Barat	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	11	Laporan	927.504.800		6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	11	Laporan	700.000.000	-



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Rancangan Awal RKPD								Hasil analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3		4	5		6	7	8	9		10	11		12		13	14
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	8,04	Poin	2.544.592.000	5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	8,04	Poin	2.862.000.000	-
				Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan	100	Persen						Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan	100	Persen		-
				Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	8,07	Poin						Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	8,07	Poin		-
				Jawa Barat	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Persen						Jawa Barat	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Persen		-
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	397.191.680			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	420.000.000	-
		2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jawa Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang perekonomian	4	Laporan	104.670.000			2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan	210.000.000	-
		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jawa Barat	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	12	Laporan	1.027.343.420			3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12	Laporan	1.100.000.000	-
		4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	520.098.000			4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	502.000.000	-
		5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jawa Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang Sumber Daya Alam	4	Laporan	104.778.000			5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Laporan	210.000.000	-
		6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jawa Barat	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam	9	Laporan	390.510.900			6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	9	Laporan	420.000.000	-
6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8,15	Poin	5.773.130.000	6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8,15	Poin	5.933.500.000	-



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Rancangan Awal RKPD							Hasil analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
			Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang sesuai ketentuan	100	Persen	370.107.615			Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang sesuai ketentuan	100	Persen	370.107.615	-				
			Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	8,67	Poin				Jawa Barat	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	8,67	Poin						
			Jawa Barat	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100	Persen				Jawa Barat	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100	Persen						
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen		370.107.615	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	370.107.615	-		
		2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan		384.098.240	2	Peleksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	384.098.240	-		
		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jawa Barat	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	10	Laporan		757.056.620	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10	Laporan	757.056.620	-		
		4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen		448.679.475	4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	Jumiah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	448.679.475	-		
		5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7	Laporan		313.188.050	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7	Laporan	473.558.050	-		
		6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jawa Barat	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	8	Laporan		3.500.000.000	6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jawa Barat	Jumiah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	8	Laporan	3.500.000.000	-		
		3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Jawa Barat	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A		Kategori	67.504.953.858	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Jawa Barat	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	Kategori	58.753.463.990	-
					Jawa Barat	Persentase Belanja PDN Bappeda Jabar	95		Persen				Jawa Barat	Persentase Belanja PDN Bappeda Jabar	95	Persen		-	
7	Perencanaan, Penganggaran, dan		Jawa Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	AA	Kategori	2.960.000.000	7	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jawa Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	AA	Kategori	1.699.963.000	-				



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Rancangan Awal RKPD								Hasil analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3		4	5		6	7	8	9		10	11		12		13	14
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	1.800.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	1.352.963.000	-	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	65.000.000		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	23.000.000	-	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	65.000.000		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	23.000.000	-	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	65.000.000		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	23.000.000	-	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	65.000.000		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	23.000.000	-	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	150.000.000		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	80.000.000	-	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	150.000.000		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	75.000.000	-	
		8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jawa Barat	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	300.000.000		8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jawa Barat	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	50.000.000	-	
		9	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	300.000.000		9	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	-	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jawa Barat	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	97,55	Persen	50.078.682.739	8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jawa Barat	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	97,55	Persen	41.422.852.804	-
				Jawa Barat	Persentase TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100	Persen							Jawa Barat	Persentase TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100	Persen	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	Orang/Bulan	49.744.763.239			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	Orang/Bulan	41.088.933.304	-
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	20.920.000			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	20.920.000	-
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	23.407.000			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	23.407.000	-
		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	39.600.000			4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	39.600.000	-



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Rancangan Awal RKPD								Hasil analisis Kebutuhan								Catatan Penting		
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana	
1	2	3		4	5		6	7	8	9		10	11		12		13	14
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	245.498.000			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Barat	Jumiah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	245.498.000	-
		6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	4.494.500			6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	4.494.500	-
9	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Jawa Barat	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100	Persen	99.896.140	9	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Jawa Barat	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100	Persen	100.000.000	-
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	17.620.000			1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	24.000.000	-
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	42.069.400			2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	39.000.000	-
		3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Barat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	40.206.740			3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Barat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	37.000.000	-
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jawa Barat	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	92,63	Poin	1.187.472.008	10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jawa Barat	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	92,63	Poin	1.200.000.000	-
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	274.392.048			1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	275.000.000	-
		2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	223.063.680			2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	225.000.000	-
		3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	263.134.280			3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	265.000.000	-
		4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Barat	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	orang	319.094.000			4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jawa Barat	Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	orang	325.000.000	-
		5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Barat	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	orang	107.788.000			5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	orang	110.000.000	-
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jawa Barat	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	100	Persen	3.956.317.334	11	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jawa Barat	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	100	Persen	4.000.000.000	-
				Jawa Barat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	96,00	Poin						Jawa Barat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	96,00	Poin		-
				Jawa Barat	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	80,31	Poin						Jawa Barat	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	80,31	Poin		-
				Jawa Barat	Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi	100	Persen						Jawa Barat	Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi	100	Persen		-
				Jawa Barat	Tingkat kematangan SPBE Perangkat Daerah	90,04	Poin						Jawa Barat	Tingkat kematangan SPBE Perangkat Daerah	90,04	Poin		-



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Rancangan Awal RKPD								Hasil analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana			
1	2	3		4	5		6	7	8	9		10	11		12		13	14		
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jawa Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1	Paket	80.028.000		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jawa Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	90.000.000	-	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1	Paket	629.842.568		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket	630.000.000	-	
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jawa Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1	Paket	228.299.800		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jawa Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	Paket	230.000.000	-	
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jawa Barat	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1	Paket	366.932.800		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jawa Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	Paket	370.000.000	-	
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	Laporan	206.622.000		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	Laporan	300.000.000	-	
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Barat	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3	Laporan	2.011.897.439		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3	Laporan	1.965.000.000	-	
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	Dokumen	161.128.887		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	Dokumen	155.000.000	-	
		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	Dokumen	271.565.840		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	Dokumen	260.000.000	-	
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jawa Barat	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi		100	Persen	1.503.100.000	12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jawa Barat	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi		100	Persen	2.300.000.000	-
		Jawa Barat	Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi PDN		95	Persen						Jawa Barat	Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi PDN		95	Persen		-		
1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jawa Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	Unit	1.132.560.000	1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jawa Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	Unit	0	-	
2		Pengadaan Mebel	Jawa Barat	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	Paket	288.600.000	1			Pengadaan Mebel	Jawa Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	Paket	200.000.000	-	
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		177	Unit	81.940.000	2			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		177	Unit	2.100.000.000	-	
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jawa Barat	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi		100	Persen	6.396.052.137	13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jawa Barat	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi		100	Persen	6.450.037.000	-
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		1	Laporan	1.171.536.283	1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	Laporan	1.175.000.000	-	
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1	Laporan	227.380.000	2			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Laporan	275.000.000	-	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jawa Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1	Laporan	4.997.135.854	3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jawa Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	5.000.037.000	-	
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Jawa Barat	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100	Persen	1.323.433.500	14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Jawa Barat	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100	Persen	1.580.611.186	-



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Rancangan Awal RKPD								Hasil analisis Kebutuhan								Catatan Penting				
No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3		4	5		6		7	8	9		10	11			12		13	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jawa Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		93	unit	1.093.222.500	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jawa Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		93	unit	1.030.366.186	-	
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Barat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		100	unit	185.711.000		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100	unit	220.245.000	-	
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jawa Barat	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	unit	44.500.000		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jawa Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit	330.000.000	-	
Jumlah Total									93.495.741.797	Jumlah Total									98.747.803.990	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Dari tabel diatas terlihat bahwa adanya perbedaan nilai anggaran, yang mana kebutuhan anggaran pada Tahun 2025 lebih besar angkanya dari pagu indikatif Tahun 2025. Perbedaan yang signifikan ini salah satunya disebabkan karena terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K) pada Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang mana sebagai penganggaran awalnya ditempatkan di Bappeda, sebelum nantinya akan dialokasikan untuk perangkat daerah teknis/penerima manfaat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan haruslah sinkron, sinergis, dan terintegrasi antara satu dan lainnya sehingga membentuk irama pembangunan yang harmonis dan selaras antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Perencanaan juga haruslah disusun secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi para pelaku pembangunan. Sebagai tindak lanjut, Bappeda Provinsi Jawa Barat senantiasa melaksanakan proses *bottom-up* yaitu diantaranya melalui Forum Perangkat Daerah yang melibatkan unsur pentahelix dengan tema yang selaras dengan tema RKPD. Selanjutnya hasil pembahasan dan berbagai usulan program dan kegiatan yang mengemuka dalam Forum Bappeda maupun Musrenbang Provinsi menjadi input untuk telaahan dalam menentukan program dan kegiatan lingkup Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilaksanakan Forum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan beberapa usulan/masukan dari setiap *stakeholder* pembangunan melalui penyepakatan beberapa hal berkenaan dengan perencanaan pembangunan, diantaranya:

1. Perencanaan Lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagai berikut:
 - 1) Menyepakati program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

- diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Bappeda Provinsi Jawa Barat;
- 2) Menyepakati rancangan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
 - 3) Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah;
 - 4) *Timeline* Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2025;
 - 5) Sistematisa/Mekanisme pengusulan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
 - 6) Penggunaan aplikasi untuk pengajuan usulan aspirasi masyarakat khususnya bantuan keuangan Kabupaten/Kota melalui domain sipdri.kemendagri.go.id;
 - 7) Penyampaian kertas kerja untuk penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi 2025-2045;
 - 8) Penyepakatan jadwal penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi 2025-2045;
2. Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagai berikut:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 fokus bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan isu strategis yaitu:
 - a. Percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan;
 - c. Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana;
 - d. Akselerasi Pemenuhan SPM;
 - e. Penerapan tata kelola pemerintah berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.



- 2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mencapai target fokus pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Tahun 2025 sesuai dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 melalui:
 - a. Melakukan upaya konvergensi untuk penurunan angka prevalensi stunting (12,93 persen di tahun 2025);
 - b. Melakukan upaya penghapusan Kemiskinan Ekstrem (0 persen);
 - c. Mendorong Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (74,39 poin);
 - d. Melaksanakan pengarusutamaan gender melalui pencapaian target Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90.31 poin dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 71,75 poin;
 - e. Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM);
 - f. Mendorong pencapaian SPM 100 persen melalui percepatan pemenuhan SPM sesuai standar; dan
 - g. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Transformasi Digital dengan mencapai predikat minimal sangat baik dalam SPBE untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
- 3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berkomitmen melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta peningkatan Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif dalam penurunan stunting;
- 4) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berkomitmen melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui 3



- (tiga) strategi utama yaitu: 1). Menurunkan beban pengeluaran masyarakat; 2). Meningkatkan pendapatan masyarakat; 3). Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- 5) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pembangunan pada aspek yang mendorong peningkatan IPM;
 - 6) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - 7) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memenuhi target pencapaian SPM 100 persen sesuai dengan hak-hak dasar masyarakat yang menjadi sasaran layanan untuk jenis dan mutu layanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mendorong pelaporan pada web monitoring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - 8) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) di Jawa Barat;
 - 9) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital dengan menyediakan infrastruktur dan pemenuhan indikator penilaian SPBE;
3. Prencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sebagai berikut:
- 1) Telah disampaikan arahan, kebijakan, dan isu strategis Provinsi Jawa Barat dalam rancangan Dokumen RPD 2024 - 2026 dan Dokumen RKPD 2024, antara lain:



C5F868F5F2

- a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir : kebencanaan;
 - b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat;
 - c. Pengembangan dan pembangunan Kawasan industri rebana, kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung;
 - d. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah;
 - e. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah;
 - f. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g. Pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik;
 - h. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - i. Penyediaan transportasi masal perkotaan.
- 2) Masukan kabupaten/kota terhadap kebijakan Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar serta pembahasan usulan kamus hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan:
- a. Mekanisme usulan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan, akan digunakan sistem SIPD-RI sebagaimana yang diarahkan oleh Ditjen Bina Bangda (pengelolaan oleh Ditjen Bina Bangda)
 - b. Usulan hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan disampaikan sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota melalui pendanaan kompetitif
 - c. Usulan terkait peningkatan pelayanan infrastruktur sarana prasarana persampahan serta pembangunan *septic tank* individu karena keterbatasannya lahan dalam pembangunan IPAL komunal di Kota Tasikmalaya
 - d. Pada usulan terkait operasional TPPAS Nambo, diharapkan bantuan dari provinsi dalam meningkatkan pelayanan dengan kapasitas yang lebih besar



- e. Diharapkan menguatkan kembali regulasi dukungan pusat dan provinsi dalam pengembangan infrastruktur kewilayahan sesuai dengan pedoman yang berlaku karena saat ini implementasi regulasi tidak berkembang secara signifikan
 - f. Usulan adanya fasilitasi dari provinsi dalam sinkronisasi wilayah perbatasan yang ada pada Provinsi Jawa Barat serta diharapkan adanya bantuan dari provinsi terkait pedoman regulasi harga lahan yang ada di Jabodetabek
 - g. Diharapkan adanya pedoman kriteria pemerataan pembangunan dari provinsi terhadap kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Jawa Barat
4. Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagai berikut:
- 1) Kabupaten/Kota menyepakati tiga isu strategis dalam tema Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan, yaitu tingginya Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Ketimpangan Pendapatan;
 - 2) Kabupaten/Kota akan menambahkan pada arah kebijakan yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan, dengan memperkaya analisis di luar LQ, *Shift Share*, dan Klassen;
 - 3) Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota perlu disesuaikan, secara *lebih spesifik* serta menggambarkan dan mengidentifikasi potensi ekonomi daerahnya;
 - 4) Dalam merumuskan arah kebijakan diperlukan pendekatan kewilayahan;
 - 5) Arah kebijakan penguatan sistem pangan didorong pada 3 (tiga) pilar yaitu akses, ketersediaan, dan pemanfaatan;
 - 6) Elaborasi analisis LQ, *Shift Share*, Klassen dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, dan peraturan lainnya;
 - 7) Agar ditambahkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan pada sektor primer.



Selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Kementerian Dalam Negeri RI juga telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui media elektronik berbasis *website*, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.



Sumber: Manual Book SIPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat

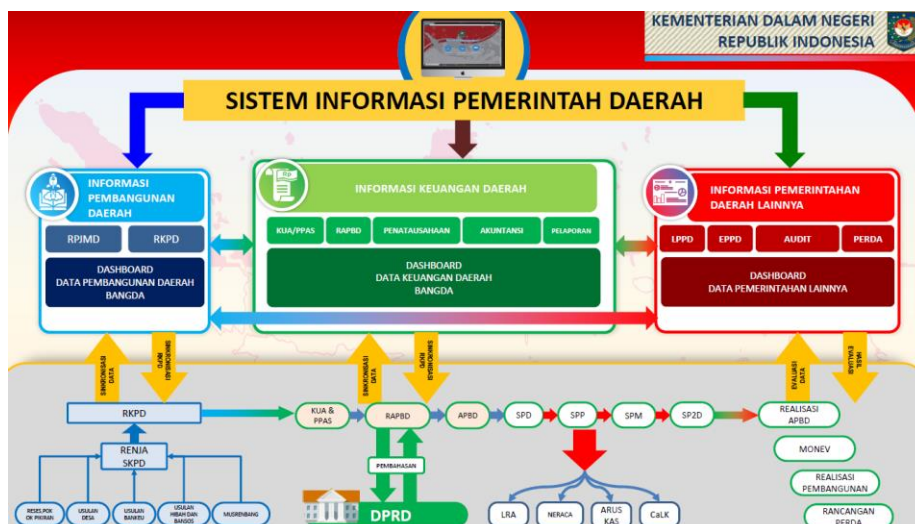
Gambar 2.1
Tampilan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi:

- a) Informasi Pembangunan Daerah;
- b) Informasi Keuangan Daerah; dan
- c) Informasi Pemerintahan Daerah lainnya.



C5F868F5F2



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Gambar 2.2
Bagan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah mutlak diperlukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi. Guna merespon berbagai dinamika yang ada, Pemerintah Daerah dituntut untuk terus bertransformasi, berpikiran terbuka dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah diantaranya seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Selanjutnya dalam rangka penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Implikasi dari berbagai kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat tersebut berdampak pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertambah serta adanya perubahan pada skema pengelolaan keuangan daerah. Untuk memastikan pembangunan Jawa Barat dapat



berjalan terarah dan efektif, diperlukan rencana pembangunan tahunan yang sistematis yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan turut mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, berkewajiban untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan pembangunan Nasional pada Tahun 2025. Sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Prioritas Nasional (PN) menjadi salah satu acuan dalam RKP Tahun 2025 yang dituangkan di dalamnya. Kesesuaian Prioritas Pembangunan tersebut diuraikan lebih lanjut dengan dirumuskannya keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2025; tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2025 dengan sasaran PN RKP Tahun 2025; keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan PN RKP Tahun 2025 serta tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2025.

Rumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 tersebut telah memperhatikan program prioritas nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2025 serta didasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023 serta situasi dan kondisi eksternal (global).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ditujukan untuk: (1) menjadi acuan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;



(2) menyediakan arahan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan (3) menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025.

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, dengan mengacu pada isu strategis di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 telah menetapkan Prioritas Pembangunan, yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan UMKM, Petani, Nelayan, dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya; 2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama; 3) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah; 4) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana; 5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa; dan 6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Adapun tema pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu “Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”.

Adapun sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat yang bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; dan
2. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Jawa Barat yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.



3.3 Program dan kegiatan

3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 mempertimbangkan isu strategis serta berbagai usulan yang masuk dalam berbagai forum koordinasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama penentu keberhasilan pembangunan. Jawa Barat memiliki potensi yang besar seiring dengan jumlah penduduknya yang terbanyak di Indonesia saat ini. Agar potensi jumlah penduduk ini dapat dioptimalkan, Bappeda telah menyiapkan langkah strategis dari sisi perencanaan yang tentunya diselaraskan dan dikolaborasikan dengan berbagai unsur pelaku pembangunan, yaitu diantaranya upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Lanjut Usia serta penyusunan Dokumen Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang merupakan perwujudan komitmen Bappeda untuk terus berperan aktif dalam mengawal RAD TPB/SDGs.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dapat diwujudkan dengan mendorong peningkatan pembangunan dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Sinergitas perencanaan pada bidang perekonomian, penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran, optimalisasi potensi wilayah untuk menarik investasi, fokus untuk meminimalisasi kesenjangan antar wilayah, serta inovasi pada sektor pertanian dan perdagangan dapat menjadi instrumen penting untuk membangun ekonomi Jawa Barat yang berkualitas dan berkelanjutan.



3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pemerataan pembangunan wilayah dengan didukung infrastruktur dan lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang dan wilayah di Jawa Barat. Hal ini merespon perkembangan yang terjadi saat ini yaitu isu kesenjangan wilayah yang masih menjadi salah satu tantangan utama Jawa Barat dan perubahan iklim serta sebagai bentuk mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul akibat tidak terkendalinya penanganan lingkungan.

4. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Peningkatan demokrasi dan reformasi birokrasi dan budaya inovatif merupakan tantangan yang perlu disikapi untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Sebagai pengampu fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seluruh ASN Bappeda berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi, adaptif, inovatif dan mengedepankan keterbukaan dan kolaborasi sehingga aspek akuntabilitas dan transparansi, serta kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.

3.3.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 akan diimplementasikan melalui program prioritas dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder*. Program prioritas ditetapkan sebagai upaya transformasi pembangunan dengan melanjutkan Program Juara. Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu *stakeholder*, mengampu dua prioritas pembangunan, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun uraian program prioritas daerah dan program pembangunan daerah yang diampu oleh Bappeda adalah sebagai berikut.



Tabel 3.1
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ke dalam
Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Tahun	Program Prioritas Daerah	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	2025	Pemerintahan Juara	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						2 Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						2 Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						3 Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						4 Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						5 Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						6 Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja, maka langkah selanjutnya yaitu menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan dan 71 sub kegiatan, antara lain:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Indikatif Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			12.500.840.000
	1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		7.997.522.000
		1.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.148.310.000
		1.1.2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	724.192.040
		1.1.3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	700.000.000
		1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100.000.000
		1.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2.500.000.000
		1.1.6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.825.019.960
	1.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		2.350.000.000
		1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	850.000.000
		1.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	500.000.000
		1.2.3 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
		1.2.4 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	500.000.000
	1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		2.153.318.000
		1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	811.088.000
		1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000
		1.3.3 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	342.230.000
2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			27.493.500.000
	2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Manusia		18.698.000.000
		2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.898.000.000
		2.1.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	200.000.000
		2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	300.000.000
		2.1.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	400.000.000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

C5F868F5F2

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		2.1.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000.000
		2.1.6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	700.000.000
		2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.862.000.000
		2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	420.000.000
		2.2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	210.000.000
		2.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.100.000.000
		2.2.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	502.000.000
		2.2.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	210.000.000
		2.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	420.000.000
		2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.933.500.000
		2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	370.107.615
		2.3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	384.098.240
		2.3.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	757.056.620
		2.3.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	448.679.475
		2.3.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	473.558.050



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	
1		2		3		4	
					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
				2.3.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3.500.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						58.753.463.990
3.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.699.963.000	
3.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.352.963.000			
3.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	23.000.000			
3.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.000.000			
3.1.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.000.000			
3.1.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	23.000.000			
3.1.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000			
3.1.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000			
3.1.8			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000			
3.1.9			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000			
3.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				41.422.852.804	
3.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.088.933.304			
3.2.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.920.000			
3.2.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.407.000			
3.2.4			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	39.600.000			
3.2.5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	245.498.000			
3.2.6			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.494.500			
3.3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				100.000.000	
3.3.1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24.000.000			
3.3.2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	39.000.000			
3.3.3			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.000.000			
3.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.200.000.000	
3.4.1			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	275.000.000			
3.4.2			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	225.000.000			
3.4.3			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	265.000.000			
3.4.4			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	325.000.000			
3.4.5			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
	3.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.000.000.000
		3.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.000.000
		3.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	630.000.000
		3.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	230.000.000
		3.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	370.000.000
		3.5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	300.000.000
		3.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.965.000.000
		3.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	155.000.000
		3.5.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.000.000
	3.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.300.000.000
		3.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		3.6.1 Pengadaan Mebel	200.000.000
		3.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000.000
	3.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.450.037.000
		3.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.175.000.000
		3.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.000.000
		3.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.037.000
	3.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.580.611.186
		3.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.030.366.186
		3.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.245.000
		3.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.000.000

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Tahun 2025 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 98.747.803.990 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
						PERENCANAAN									
5	1	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	13,44	Poin	12.500.840.000	APBD	13,48
								2	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	11,40	Poin		APBD	11,44
5	1	02	1.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi	Jawa Barat	7,96	Poin	7.997.522.000	APBD	8,00
								2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen		APBD	100
								3	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi	Jawa Barat	100	Persen		APBD	100
5	1	02	1.01	01			1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jawa Barat	2	Dokumen	1.148.310.000	APBD	1	1.263.141.000
5	1	02	1.01	02			2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jawa Barat	4	Dokumen	724.192.040	APBD	2	796.611.244
5	1	02	1.01	03			3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jawa Barat	2	Berita Acara	700.000.000	APBD	1	770.000.000
5	1	02	1.01	04			4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jawa Barat	1	Berita Acara	100.000.000	APBD	1	110.000.000
5	1	02	1.01	05			5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jawa Barat	2	Berita Acara	2.500.000.000	APBD	1	2.750.000.000
5	1	02	1.01	06			6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jawa Barat	6	Dokumen	2.825.019.960	APBD	4	3.107.521.956
5	1	02	1.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang		1	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen	2.350.000.000	APBD	100
								2	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen		APBD	100



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
5	1	02	1.02	01	Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jawa Barat	4	Dokumen	850.000.000	APBD	4	935.000.000
5	1	02	1.02	02		2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Jawa Barat	76	orang	500.000.000	APBD	76	550.000.000
5	1	02	1.02	03		3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah sumber daya manusia pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jawa Barat	54	orang	500.000.000	APBD	54	550.000.000
5	1	02	1.02	04		4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	1	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Jawa Barat	1	buku	500.000.000	APBD	1	550.000.000
5	1	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Provinsi	Jawa Barat	8,30	Poin	2.153.318.000	APBD	8,34	2.368.649.800
								2	Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Kab/Kota yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen		APBD	100	
5	1	02	1.03	01		1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jawa Barat	4	Laporan	811.088.000	APBD	4	892.196.800
5	1	02	1.03	03		2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Jawa Barat	12	Laporan	1.000.000.000	APBD	12	1.100.000.000
5	1	02	1.03	04		3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/kota yang difasilitasi/evaluasi	Jawa Barat	4	Dokumen	342.230.000	APBD	4	376.453.000
5	1	03			2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	13,55	Poin	27.493.500.000	APBD	13,59	30.242.850.000
							2	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Jawa Barat	11,93	Poin	APBD		11,97		
							3	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Jawa Barat	13,29	Poin	APBD		13,33		
							4	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA.	Jawa Barat	9,90	Poin	APBD		9,94		
							5	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	13,27	Poin	APBD		13,31		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4		5	6		7	8	9	10	11
								6	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	11,98	Poin		APBD			12,02	
5	1	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	7,88	Poin	18.698.000.000	APBD			7,92	20.567.800.000
						2	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	100	Persen		APBD			100			
						3	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	8,31	Poin		APBD			8,35			
						4	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen		APBD			100			
5	1	3	1.01	01		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	5	Dokumen	16.898.000.000	APBD			3	18.587.800.000
5	1	03	1.01	03	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jawa Barat	4	Laporan	200.000.000	APBD			4	220.000.000	
5	1	03	1.01	04	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jawa Barat	9	Laporan	300.000.000	APBD			6	330.000.000	
5	1	03	1.01	05	4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	Jawa Barat	3	Dokumen	400.000.000	APBD			2	440.000.000	
5	1	03	1.01	07	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jawa Barat	4	Laporan	200.000.000	APBD			4	220.000.000	
5	1	03	1.01	08	6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jawa Barat	11	Laporan	700.000.000	APBD			8	770.000.000	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2		3		4		5	6		7	8	9	10	11
5	1	03	1.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			1	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Jawa Barat	8,04	Poin	2.862.000.000	APBD		8,08	3.148.200.000	
									2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan	Jawa Barat	100	Persen		APBD		100		
									3	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Jawa Barat	8,07	Poin		APBD		8,11		
									4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jawa Barat	100	Persen		APBD		100		
5	1	03	1.02	01			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	5	Dokumen	420.000.000	APBD		2	462.000.000	
5	1	03	1.02	03			2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jawa Barat	4	Laporan	210.000.000	APBD		4	231.000.000	
5	1	03	1.02	04			3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Jawa Barat	12	Laporan	1.100.000.000	APBD		9	1.210.000.000	
5	1	03	1.02	05			4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	5	Dokumen	502.000.000	APBD		2	552.200.000	
5	1	03	1.02	07			5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jawa Barat	4	Laporan	210.000.000	APBD		4	231.000.000	
5	1	03	1.02	08			6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam	Jawa Barat	9	Laporan	420.000.000	APBD		6	462.000.000	
5	1	03	1.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	8,15	Poin	5.933.500.000	APBD		8,19	6.526.850.000	
									2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai ketentuan	Jawa Barat	100	Persen		APBD		100		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4		5	6		7	8	9	10	11
								3	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	8,67	Poin		APBD			8,71	
								4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	100	Persen		APBD			100	
5	1	03	1.03	01		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	3	Dokumen	370.107.615	APBD			2	407.118.377
5	1	03	1.03	03		2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jawa Barat	4	Laporan	384.098.240	APBD			4	422.508.064
5	1	03	1.03	04		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	Jawa Barat	10	Laporan	757.056.620	APBD			7	832.762.282
5	1	03	1.03	05		4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	4	Dokumen	448.679.475	APBD			3	493.547.423
5	1	03	1.03	07		5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jawa Barat	7	Laporan	473.558.050	APBD			7	520.913.855
5	1	03	1.03	08		6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	Jawa Barat	8	Laporan	3.500.000.000	APBD			5	3.850.000.000
5	1	01			3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	A	Kategori	58.753.463.990	APBD		A	58.919.858.650
						2	Persentase Belanja PDN Bappeda Jabar			Jawa Barat	95	Persen	APBD			98		
5	1	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jawa Barat	AA	Kategori	1.699.963.000	APBD		AA	1.759.959.300
5	1	01	1.01	01		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Barat	8	Dokumen	1.352.963.000	APBD			7	1.488.259.300
5	1	01	1.01	02		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	23.000.000	APBD			1	25.300.000



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	23.000.000	APBD	1	25.300.000
5	1	01	1.01	04			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	23.000.000	APBD	1	25.300.000
5	1	01	1.01	05			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	23.000.000	APBD	1	25.300.000
5	1	01	1.01	06			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Barat	12	Laporan	80.000.000	APBD	12	88.000.000
5	1	01	1.01	07			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Barat	7	Laporan	75.000.000	APBD	7	82.500.000
5	1	01	1.01	08			8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jawa Barat	1	Data	50.000.000	APBD	1	55.000.000
5	1	01	1.01	09			9	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jawa Barat	1	Dokumen	50.000.000	APBD	1	55.000.000
5	1	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1		Jawa Barat	97,55	Persen	41.422.852.804	APBD	97,60	45.565.138.084
							2		Jawa Barat	100	Persen		APBD	100	
5	1	01	1.02	01			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Barat	180	Orang/Bulan	41.088.933.304	APBD	180	45.197.826.634
5	1	01	1.02	02			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Barat	1	Dokumen	20.920.000	APBD	1	23.012.000
5	1	01	1.02	05			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Barat	1	Laporan	23.407.000	APBD	1	25.747.700
5	1	01	1.02	06			4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jawa Barat	3	Dokumen	39.600.000	APBD	3	43.560.000
5	1	01	1.02	07			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Barat	18	Laporan	245.498.000	APBD	18	270.047.800
5	1	01	1.02	08			6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Barat	1	Dokumen	4.494.500	APBD	1	4.943.950
5	1	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1		Jawa Barat	100	Persen	100.000.000	APBD	100	110.000.000
5	1	01	1.03	01			1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	24.000.000	APBD	1	26.400.000



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2		3		4		5	6		7	8	9	10	11
5	1	01	1.03	02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	39.000.000	APBD		1	42.900.000	
5	1	01	1.03	05			3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Barat	2	Laporan	37.000.000	APBD		2	40.700.000	
5	1	01	1.05						1	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jawa Barat	92,63	Poin	1.200.000.000	APBD		92,64	1.320.000.000	
5	1	01	1.05	03			1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Barat	2	Dokumen	275.000.000	APBD		2	302.500.000	
5	1	01	1.05	04			2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Barat	1	Dokumen	225.000.000	APBD		1	247.500.000	
5	1	01	1.05	05			3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Barat	2	Dokumen	265.000.000	APBD		2	291.500.000	
5	1	01	1.05	09			4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jawa Barat	50	orang	325.000.000	APBD		50	357.500.000	
5	1	01	1.05	10			5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Barat	200	orang	110.000.000	APBD		200	121.000.000	
5	1	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	Jawa Barat	100	Persen	4.000.000.000	APBD		100	4.400.000.000	
									2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Jawa Barat	96	Poin		APBD		96,5		
									3	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Jawa Barat	80,31	Poin		APBD		80,33		
									4	Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi	Jawa Barat	100	persen		APBD		100		
									5	Tingkat kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jawa Barat	90,04	poin		APBD		90,06		
5	1	01	1.06	01			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jawa Barat	1	Paket	90.000.000	APBD		1	99.000.000	
5	1	01	1.06	02			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jawa Barat	1	Paket	630.000.000	APBD		1	693.000.000	
5	1	01	1.06	03			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jawa Barat	1	Paket	230.000.000	APBD		1	253.000.000	
5	1	01	1.06	05			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jawa Barat	1	Paket	370.000.000	APBD		1	407.000.000	
5	1	01	1.06	08			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Barat	1	Laporan	300.000.000	APBD		1	330.000.000	
5	1	01	1.06	09			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Barat	3	Laporan	1.965.000.000	APBD		3	2.161.500.000	
5	1	01	1.06	10			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	155.000.000	APBD		1	170.500.000	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
											Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4		5	6		7	8	9	10	11
5	1	01	1.06	11		8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	260.000.000	APBD		1	286.000.000	
5	1	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	Jawa Barat	100	Persen	2.300.000.000	APBD		100	220.000.000	
								2	Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi PDN	Jawa Barat	95	Persen		APBD	97			
						1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jawa Barat	1	Unit	APBD		1			
5	1	01	1.07	05			2	Pengadaan Mebel	2	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jawa Barat	1	Paket	200.000.000	APBD		1	220.000.000
5	1	01	1.07	06		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jawa Barat	177	Unit	2.100.000.000	APBD		177	2.310.000.000	
5	1	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Jawa Barat	100	Persen	6.450.037.000	APBD		100	7.095.040.700	
5	1	01	1.08	02		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jawa Barat	1	Laporan	1.175.000.000	APBD		1	1.292.500.000	
5	1	01	1.08	03		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jawa Barat	1	Laporan	275.000.000	APBD		1	302.500.000	
5	1	01	1.08	04		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jawa Barat	1	Laporan	5.000.037.000	APBD		1	5.500.040.700	
5	1	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jawa Barat	100	Persen	1.580.611.186	APBD		100	1.738.672.305	
5	1	01	1.09	02		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jawa Barat	93	unit	1.030.366.186	APBD		93	1.133.402.805	
5	1	01	1.09	06		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jawa Barat	100	unit	220.245.000	APBD		100	242.269.500	
5	1	01	1.09	10		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jawa Barat	1	unit	330.000.000	APBD		1	363.000.000	

Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, diolah.



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk Tahun Anggaran 2025 di dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah harus mempedomani peraturan tersebut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

C5F868F5F2

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

Rencana kerja dan pendanaan untuk program/kegiatan Tahun 2025 merupakan implementasi tahun perdana dari Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang secara simultan disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang memuat 6 (enam) prioritas antara lain : 1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya; 2) Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama; 3) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah; 4) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana; 5) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa; 6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja strategis perangkat daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-6 yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Sebagaimana hasil perumusan arsitektur kinerja pembangunan daerah maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan serta 71 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Jawa Barat, seperti disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1					2	3	4	5	6		7	8	9		
5	1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
						PERENCANAAN									
5	1	02			1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	13,44	Poin	12.500.840.000	APBD	-	
					2		Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	11,40	Poin			APBD	-	
5	1	02	1.01		1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi	Jawa Barat	7,96	Poin	7.997.522.000	APBD	-	
							2	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen			APBD	
							3	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi	Jawa Barat	100	Persen			APBD	
5	1	02	1.01	01		1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	Jawa Barat	2	Dokumen	1.148.310.000	APBD	-
5	1	02	1.01	02		2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jawa Barat	4	Dokumen	724.192.040	APBD	-
5	1	02	1.01	03		3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jawa Barat	2	Berita Acara	700.000.000	APBD	-
5	1	02	1.01	04		4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jawa Barat	1	Berita Acara	100.000.000	APBD	-
5	1	02	1.01	05		5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Jawa Barat	2	Berita Acara	2.500.000.000	APBD	-
5	1	02	1.01	06		6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jawa Barat	6	Dokumen	2.825.019.960	APBD	-
5	1	02	1.02		2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	1	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Provinsi yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen	2.350.000.000	APBD	-	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan		
										Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1						2		3		4		5	6		7	8	9
						Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			2	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen			APBD	
5	1	02	1.02	01			1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jawa Barat	4	Dokumen	850.000.000	APBD	-	
5	1	02	1.02	02			2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Jawa Barat	76	orang	500.000.000	APBD	-	
5	1	02	1.02	03			3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah sumber daya manusia pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jawa Barat	54	orang	500.000.000	APBD	-	
5	1	02	1.02	04			4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	1	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Jawa Barat	1	buku	500.000.000	APBD	-	
5	1	02	1.03			3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Provinsi	Jawa Barat	8,30	Poin	2.153.318.000		APBD	-
							2	Persentase Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah Kab/Kota yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100	Persen						
5	1	02	1.03	01			1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jawa Barat	4	Laporan	811.088.000	APBD	-	
5	1	02	1.03	03			2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jawa Barat	12	Laporan	1.000.000.000	APBD	-	
5	1	02	1.03	04			3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Jawa Barat	4	Dokumen	342.230.000	APBD	-	
5	1	03				2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	13,55	Poin	27.493.500.000		APBD	-
							2	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	11,93	Poin		APBD		-		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	
												Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
1						2		3		4		5	6		7	8	9
								3	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Jawa Barat	13,29	Poin		APBD	-		
								4	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA.	Jawa Barat	9,90	Poin		APBD	-		
								5	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	13,27	Poin		APBD	-		
								6	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	11,98	Poin		APBD	-		
5	1	03	1.01		4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	7,88	Poin	18.698.000.000	APBD	-		
	2	Persentase Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan	Jawa Barat	100				Persen	APBD	-							
	3	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	8,31				Poin	APBD	-							
	4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jawa Barat	100				Persen	APBD	-							
5	1	3	1.01	01				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat		5	Dokumen	16.898.000.000	APBD
5	1	03	1.01	03		2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jawa Barat	4	Laporan	200.000.000	APBD	-		



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan		
											Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	
1					2		3		4		5	6		7	8	9	
5	1	03	1.01	04			3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jawa Barat	9	Laporan	300.000.000	APBD	-	
5	1	03	1.01	05			4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	3	Dokumen	400.000.000	APBD	-	
5	1	03	1.01	07			5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jawa Barat	4	Laporan	200.000.000	APBD	-	
5	1	03	1.01	08			6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jawa Barat	11	Laporan	700.000.000	APBD	-	
5	1	03	1.02		5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			1	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Jawa Barat	8,04	Poin	2.862.000.000	APBD	-	
									2	Persentase Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kab/Kota Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan	Jawa Barat	100	Persen			APBD	-
									3	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Jawa Barat	8,07	Poin			APBD	-
									4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jawa Barat	100	Persen			APBD	-
5	1	03	1.02	01			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	5	Dokumen	420.000.000	APBD	-	
5	1	03	1.02	03			2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jawa Barat	4	Laporan	210.000.000	APBD	-	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2		3		4		5	6		7	8	9
5	1	03	1.02	04			3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perekonomian	Jawa Barat	12	Laporan	1.100.000.000	APBD	-
5	1	03	1.02	05			4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	5	Dokumen	502.000.000	APBD	-
5	1	03	1.02	07			5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jawa Barat	4	Laporan	210.000.000	APBD	-
5	1	03	1.02	08			6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jawa Barat	9	Laporan	420.000.000	APBD	-
5	1	03	1.03		6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	8,15	Poin	5.933.500.000	APBD	-
									2	Persentase Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai ketentuan	Jawa Barat	100	Persen		APBD	-
									3	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	8,67	Poin		APBD	-
									4	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jawa Barat	100	Persen		APBD	-
5	1	03	1.03	01			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	3	Dokumen	370.107.615	APBD	-
5	1	03	1.03	03			2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jawa Barat	4	Laporan	384.098.240	APBD	-



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025					Catatan
											Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2		3		4		5	6		7	8	9
5	1	03	1.03	04			3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jawa Barat	10	Laporan	757.056.620	APBD	-
5	1	03	1.03	05			4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jawa Barat	4	Dokumen	448.679.475	APBD	-
5	1	03	1.03	07			5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jawa Barat	7	Laporan	473.558.050	APBD	-
5	1	03	1.03	08			6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jawa Barat	8	Laporan	3.500.000.000	APBD	-
5	1	01			3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Jawa Barat	A	Kategori	58.753.463.990	APBD	-
									2	Persentase Belanja PDN Bappeda Jabar	Jawa Barat	95	Persen		APBD	-
5	1	01	1.01		7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jawa Barat	AA	Kategori	1.699.963.000	APBD	-
5	1	01	1.01	01			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Barat	8	Dokumen	1.352.963.000	APBD	-
5	1	01	1.01	02			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	23.000.000	APBD	-
5	1	01	1.01	03			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	23.000.000	APBD	-
5	1	01	1.01	04			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	23.000.000	APBD	-
5	1	01	1.01	05			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	23.000.000	APBD	-
5	1	01	1.01	06			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Barat	12	Laporan	80.000.000	APBD	-



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan		
											Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	
1						2		3		4		5	6		7	8	9
5	1	01	1.01	07			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Barat	7	Laporan	75.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.01	08			8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jawa Barat	1	Data	50.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.01	09			9	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jawa Barat	1	Dokumen	50.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.02		8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Jawa Barat	97,55	Persen	41.422.852.804	APBD	-	
									2	Persentase TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	Jawa Barat	100	Persen		APBD	-	
5	1	01	1.02	01			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Barat	180	Orang/Bulan	41.088.933.304	APBD	-	
5	1	01	1.02	02			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Barat	1	Dokumen	20.920.000	APBD	-	
5	1	01	1.02	05			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Barat	1	Laporan	23.407.000	APBD	-	
5	1	01	1.02	06			4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jawa Barat	3	Dokumen	39.600.000	APBD	-	
5	1	01	1.02	07			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Barat	18	Laporan	245.498.000	APBD	-	
5	1	01	1.02	08			6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Barat	1	Dokumen	4.494.500	APBD	-	
5	1	01	1.03		9	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			1	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi	Jawa Barat	100	Persen	100.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.03	01					1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	24.000.000	APBD
5	1	01	1.03	02			2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	39.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.03	05			3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Barat	2	Laporan	37.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.05		10	Administrasi Kepegawaian			1	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jawa Barat	92,63	Poin	1.200.000.000	APBD	-	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025						Catatan	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1					2	3		4		5	6		7	8		9	
5	1	01	1.05	03		Perangkat Daerah	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Barat	2	Dokumen	275.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.05	04			2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Barat	1	Dokumen	225.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.05	05			3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Barat	2	Dokumen	265.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.05	09			4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jawa Barat	50	orang	325.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.05	10			5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Barat	200	orang	110.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.06		11	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	Jawa Barat	100	Persen	4.000.000.000	APBD	-	
										2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Jawa Barat	96		Poin	APBD	-
										3	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Jawa Barat	80,31		Poin	APBD	-
										4	Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi	Jawa Barat	100		Persen	APBD	-
										5	Tingkat kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jawa Barat	90,04		Poin	APBD	-
5	1	01	1.06			01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jawa Barat	1	Paket	90.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.06			02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Barat	1	Paket	630.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.06			03	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jawa Barat	1	Paket	230.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.06			05	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Barat	1	Paket	370.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.06			08	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Barat	1	Laporan	300.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.06			09	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Barat	3	Laporan	1.965.000.000	APBD	-	
5	1	01	1.06			10	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	155.000.000	APBD	-	



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan	
											Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
1					2		3		4		5	6		7	8	9
5	1	01	1.06	11			8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jawa Barat	1	Dokumen	260.000.000	APBD	-
5	1	01	1.07		12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	Jawa Barat	100	Persen	2.300.000.000	APBD	-
									2	Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi PDN	Jawa Barat	95	Persen		APBD	-
							1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jawa Barat	1	Unit			
5	1	01	1.07	05			1	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jawa Barat	1	Paket	200.000.000	APBD	-
5	1	01	1.07	06			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jawa Barat	177	Unit	2.100.000.000	APBD	-
5	1	01	1.08		13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Jawa Barat	100	Persen	6.450.037.000	APBD	-
5	1	01	1.08	02					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jawa Barat	1	Laporan	1.175.000.000
5	1	01	1.08	03			2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Barat	1	Laporan	275.000.000	APBD	-
5	1	01	1.08	04			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Barat	1	Laporan	5.000.037.000	APBD	-
5	1	01	1.09		14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jawa Barat	100	Persen	1.580.611.186	APBD	-
5	1	01	1.09	02					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jawa Barat	93	unit	1.030.366.186
5	1	01	1.09	06			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jawa Barat	100	unit	220.245.000	APBD	-
5	1	01	1.09	10			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Barat	1	unit	330.000.000	APBD	-

Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, diolah.



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

BAB V **P E N U T U P**

Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Renja Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun sebagai pedoman kerja untuk mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan pada tahun 2025.

Sebagai upaya dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan diantara seluruh pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 secara efektif dan efisien;
2. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2025 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Tata cara penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; dan

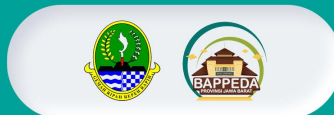
4. Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>



Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat



C5F868F5F2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5F868F5F2>